

Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product and Regional Expenditure on Local Own-Source Revenue in Jambi City

Hartoyo¹, Adi Putra², Ali Fahmi³, Moh Sahroni Nurkodri⁴

¹Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

⁴Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding author email: adiputra@umjambi.ac.id

Abstract— Introduction/Main Objective: This study aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Regional Expenditure on Regional Original Revenue (PAD) in Jambi City during the 2015–2024 period. **Background of the Problem:** PAD is a crucial indicator in assessing the fiscal independence of a region within the context of regional autonomy. **Novelty:** By employing a quantitative approach through multiple linear regression analysis, this research examines both the simultaneous and partial relationships between the independent variables (GRDP and Regional Expenditure) and the dependent variable (PAD). **Findings/Results:** The F-test results show that the regression model is statistically significant at the simultaneous level, with an F value of 15.067 and a significance level of 0.003 ($p < 0.05$). This indicates that GRDP and Regional Expenditure jointly have a significant effect on PAD. The model also has a coefficient of determination (R^2) of 0.811, implying that 81.1% of the variation in PAD can be explained by the two variables. However, the t-test results reveal that only GRDP has a significant partial effect on PAD ($p = 0.014$), while Regional Expenditure does not show a significant influence ($p = 0.632$). **Conclusion:** These findings highlight the importance of regional economic growth in enhancing PAD and underscore the need to evaluate the effectiveness of Regional Expenditure in contributing to local revenue. The policy implication is that local governments should strengthen productive economic sectors that drive GRDP and allocate regional spending to activities with a direct impact on revenue generation. This approach is essential to achieving sustainable regional fiscal independence.

Keywords: GRDP¹, Regional Expenditure², PAD³, Fiscal Independence⁴

Abstrak— Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jambi selama periode 2015–2024. **Latar Belakang Masalah:** PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. **Kebaruan:** Melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, penelitian ini menguji hubungan simultan dan parsial antara variabel independen (PDRB dan Belanja Daerah) terhadap variabel dependen (PAD). **Temuan/Hasil:** Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan dengan nilai F sebesar 15,067 dan signifikansi 0,003 ($p < 0,05$), yang berarti PDRB dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Model juga memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,811, mengindikasikan bahwa 81,1% variasi PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Namun, hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan nilai signifikansi 0,014, sementara Belanja Daerah tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,632. **Kesimpulan:** Temuan ini menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah dalam mendorong peningkatan PAD, serta perlunya evaluasi efektivitas Belanja Daerah agar mampu berkontribusi secara nyata terhadap penerimaan daerah. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif yang dapat meningkatkan PDRB, serta mengarahkan belanja daerah ke kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan lokal. Dengan demikian, kemandirian fiskal daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata kunci: PDRB¹, Belanja Daerah², PAD³, Kemandirian Fiskal⁴



1. PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengelola keuangan, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menyelenggarakan pembangunan secara efektif dan efisien. Otonomi ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kemampuan fiskal suatu daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja dan keberhasilan pembangunan daerah.

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Semakin tinggi nilai PDRB, maka semakin besar pula potensi ekonomi daerah tersebut. Peningkatan PDRB seharusnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas keuangan daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB tidak serta-merta menunjukkan bahwa daerah memiliki kemandirian fiskal yang kuat. PDRB yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat.

PAD merupakan komponen pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Kemandirian fiskal yang tinggi ditandai dengan kontribusi PAD yang signifikan terhadap total pendapatan daerah. Namun, kenyataannya di berbagai daerah, termasuk Kota Jambi, kontribusi PAD masih relatif rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

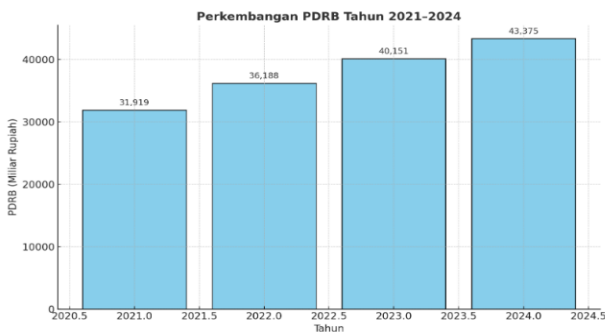
Di sisi lain, Belanja Daerah juga menjadi aspek penting dalam siklus keuangan daerah. Belanja Daerah mencerminkan kebijakan dan prioritas pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Belanja yang efektif dan efisien seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan sektor produktif. Selain itu, belanja yang diarahkan dengan tepat dapat menciptakan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Namun, jika belanja tidak disusun dan dijalankan secara strategis, maka efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan daerah bisa sangat terbatas.

Adanya kenaikan PAD yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan PDRB dan Belanja Daerah Kota Jambi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi daerah (yang tergambarkan dari PDRB), kebijakan belanja (yang tergambarkan dari Belanja Daerah), dan hasil nyata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Artinya, meskipun perekonomian Kota Jambi tumbuh, hal tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan belanja publik memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi relevan dan penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antara PDRB dan Belanja Daerah terhadap PAD di Kota Jambi. Dengan menggunakan data kuantitatif selama empat tahun terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan daerah, tetapi juga memberikan masukan kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut juga memberikan landasan kuat bahwa keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB), kebijakan fiskal

(Belanja Daerah), dan kemampuan fiskal daerah (PAD) merupakan isu sentral dalam konteks otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, analisis yang mendalam terhadap ketiga variabel ini sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih strategis, mandiri, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Fenomena tersebut berdasarkan data serta publikasi Badan Pusat Statistik Kota Jambi 2025, dimana selama periode 2021 hingga 2024, kondisi Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi tergambar seperti pada Grafik 1 berikut ini:



Grafik 1.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi 2021-2024

Berdasarkan Grafik 1, terlihat dimana selama periode 2021 hingga 2024, terlihat bahwa PDRB Kota Jambi mengalami tren peningkatan setiap tahun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang konsisten dan positif. Pada tahun 2021, PDRB Kota Jambi berada di angka Rp.31.918,63 miliar. Nilai ini kemudian meningkat menjadi Rp.36.188,04 miliar pada tahun 2022, atau tumbuh sekitar 13,4%. Pertumbuhan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19, serta adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan belanja pemerintah.

Pada tahun 2023, PDRB kembali naik menjadi Rp.40.150,78 miliar. Ini menunjukkan bahwa fondasi pemulihan ekonomi semakin kuat. Selain itu, kemungkinan adanya ekspansi sektor unggulan seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian turut mendorong peningkatan nilai tambah bruto di tingkat daerah. Memasuki tahun 2024, PDRB tumbuh lagi menjadi Rp.43.375,48 miliar. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dalam empat tahun,

PDRB tumbuh lebih dari Rp11 triliun, atau sekitar 35,9% dari posisi awal tahun 2021. Secara umum, tren kenaikan PDRB Kota Jambi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini juga inklusif dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perluasan basis penerimaan asli daerah (PAD).

Kondisi Belanja Daerah kota jambi berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Jambi 2025, seperti pada Grafik 2 berikut ini:



Grafik 2.

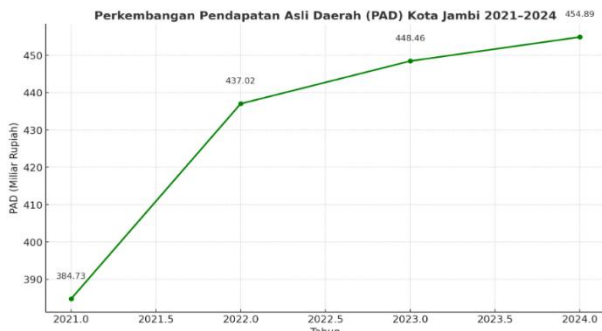
Belanja Daerah Kota Jambi tahun 2021-2024

Berdasarkan Grafik 2, Dimana pada tahun 2021, total Belanja Daerah Kota Jambi berada pada angka Rp.1.224,42 miliar, yang kemudian melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp2.280,49 miliar di tahun 2022. Lonjakan ini mengindikasikan adanya upaya serius dari pemerintah daerah Kota Jambi dalam memulihkan kondisi ekonomi dan sosial pasca-pandemi COVID-19. Belanja publik pada fase ini kemungkinan besar difokuskan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan percepatan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2023, Belanja Daerah mengalami peningkatan yang lebih moderat menjadi Rp.2.353,83 miliar, menandakan mulai stabilnya pola pengeluaran pemerintah dengan tetap mempertahankan program-program pembangunan prioritas. Pada tahun 2024, angka belanja Kota Jambi meningkat lagi menjadi Rp.2.556,01 miliar, mencerminkan ekspansi fiskal yang berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah daerah.

Dari grafik, terlihat pola pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, dengan peningkatan rata-rata tahunan sekitar 25% dari tahun awal. Kenaikan Belanja Daerah Kota Jambi ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, efektivitas program, serta

transparansi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup proaktif dalam menggunakan instrumen fiskalnya untuk mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi. Namun demikian, penting untuk terus memantau efektivitas belanja tersebut terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Jambi tahun 2025, seperti pada Grafik 3 berikut



ini:

Grafik 3.

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi 2021-2024

Grafik 3 di atas menunjukkan tren perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, PAD mengalami tren peningkatan yang cukup konsisten, meskipun dengan laju pertumbuhan yang cenderung melambat pada tahun-tahun terakhir.

Pada tahun 2021, PAD Kota Jambi tercatat sebesar Rp.384,73 miliar. Pada tahun berikutnya, yaitu 2022, terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi Rp.437,02 miliar, atau meningkat sekitar 13,6%. Kenaikan ini bisa mencerminkan adanya perbaikan sistem pemungutan pajak daerah, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang berdampak pada sektor-sektor penyumbang PAD seperti pajak restoran, hotel, parkir, dan retribusi jasa usaha lainnya.

Pada tahun 2023, PAD kembali mengalami pertumbuhan, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Nilai PAD pada tahun ini tercatat sebesar Rp.448,46 miliar, meningkat sekitar 2,6% dibandingkan tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan ini bisa saja disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan daya beli masyarakat, keterbatasan sumber-sumber PAD baru, atau

kendala dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan PAD mencapai Rp.454,89 miliar. Kenaikan ini relatif kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hanya sekitar 1,4%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD mulai mengalami kejenuhan atau membutuhkan strategi baru untuk bisa tumbuh lebih optimal. Secara keseluruhan, meskipun grafik menunjukkan tren positif, realisasi PAD Kota Jambi masih perlu ditingkatkan secara lebih inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan tata kelola, serta digitalisasi sistem pelayanan dan perpajakan untuk mendorong PAD yang lebih produktif ke depan.

Dimensi pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kapasitas fiskal, dan memperkuat basis ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pendapatan dan belanja, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Salah satu indikator utama dalam mengukur aktivitas ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah selama periode tertentu. Peningkatan PDRB biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks Kota Jambi, data menunjukkan bahwa PDRB terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari Rp.31.918,63 miliar menjadi Rp.43.375,48 miliar. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah berkembang secara konsisten.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB tidak serta-merta mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal tercermin dalam kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan operasionalnya

secara mandiri, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi lokal untuk mendanai belanja daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sayangnya, data menunjukkan bahwa meskipun PDRB Kota Jambi meningkat signifikan, pertumbuhan PAD tidak sebanding. PAD hanya meningkat dari Rp.384,73 miliar pada 2021 menjadi Rp.454,89 miliar pada 2024, atau tumbuh sekitar 18%, jauh di bawah pertumbuhan PDRB yang mencapai lebih dari 35% pada periode yang sama.

Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah keterbatasan dalam pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik melalui Belanja Daerah. Belanja daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp.1.224,42 miliar pada 2021 menjadi Rp.2.556,01 miliar pada 2024, mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan.

Hubungan antara PDRB, PAD, dan Belanja Daerah menjadi penting untuk diteliti karena secara teoritis dan praktis saling memengaruhi. Peningkatan PDRB seharusnya memberikan multiplier effect terhadap peningkatan PAD, karena aktivitas ekonomi yang meningkat akan memperbesar basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk melakukan belanja yang produktif dan tepat sasaran. Sebaliknya, belanja daerah yang diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan kembali memperkuat PDRB dan PAD.

Namun dalam kenyataannya, tidak selalu terjadi hubungan yang seimbang dan linear antara ketiga variabel tersebut. Di beberapa daerah, termasuk Kota Jambi, ditemukan bahwa pertumbuhan PDRB tidak diiringi oleh peningkatan PAD yang sepadan. Belanja daerah yang meningkat juga belum sepenuhnya

berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi lokal maupun efisiensi fiskal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pengelolaan anggaran dan potensi ekonomi daerah.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah daerah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pembangunan ekonomi daerah dalam mendukung kapasitas fiskal, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan efisiensi fiskal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang peneliti tertarik menulis sebuah penelitian dengan Hipotesis:

- H1: Produk Domestik Regional Bruto, berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jambi periode 2015 -2024.
- H2: Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jambi periode 2015 - 2024.
- H3: Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Jambi periode 2015 -2024.

2. TINJAUAN LITERATUR

1. *Konsep Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dikembangkan berdasarkan potensi daerah, tanpa

ketergantungan pada pemerintah pusat (UU Nomor 28 Tahun 2009, n.d.). PAD berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Kinanti et al., 2025).

Komponen PAD terdiri dari empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi sampah, retribusi pasar, dan retribusi parkir (Syaifullah, 2024). Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi pendapatan dari perusahaan daerah atau penyertaan modal daerah pada badan usaha. Adapun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencakup pendapatan dari hasil penjualan aset daerah, jasa giro, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Azwina Putri, 2024).

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan, dan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan PAD sangat bergantung pada efektivitas pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan setiap komponen PAD, termasuk melalui peningkatan kualitas layanan publik dan penerapan sistem pemungutan yang lebih efisien dan transparan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, mengurangi potensi kebocoran pendapatan, serta meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran (Sofi Irfan, 2023). Selain itu, transparansi dalam pengelolaan PAD juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penggunaan dana yang mereka bayarkan. Kepercayaan ini dapat diwujudkan dengan adanya akuntabilitas dalam pelaporan

penggunaan PAD, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pajak dan retribusi yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik (Syahrul Hidayatullah dkk, 2023). Ditambahkannya bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola PAD juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan daerah. Aparatur yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi serta mekanisme pemungutan pajak dan retribusi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat juga perlu diperkuat dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang potensial. Dengan adanya kerja sama yang baik, potensi PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pengelolaan PAD yang optimal tidak hanya bergantung pada kebijakan pemungutan semata, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan, transparansi dalam pengelolaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan strategi yang tepat, PAD dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan yang mendukung efektivitas pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebijakan fiskal daerah harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak serta retribusi daerah. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan terukur, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama (UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 2022).

Selain regulasi, tantangan lain dalam pengelolaan PAD adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar kewajiban fiskal dapat menghambat potensi peningkatan PAD. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah dapat melakukan kampanye melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung, publikasi di media sosial, serta penggunaan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi secara daring. Peningkatan PAD juga perlu disertai dengan kebijakan pengelolaan yang lebih efisien dan inovatif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan retribusi dari layanan jasa publik, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif dapat menjadi alternatif dalam memperluas basis penerimaan daerah (Rachmi Dewi, 2024).

Dengan adanya diversifikasi ini, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan tertentu, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Selanjutnya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan PAD harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar pajak dan retribusi jika mereka merasakan manfaat langsung dari layanan yang diberikan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, serta pelayanan publik yang berkualitas menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan timbal balik yang positif antara pemerintah dan masyarakat (Mangoting et al., 2024).

Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu mengimplementasikan berbagai strategi yang dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah perbaikan sistem administrasi dan tata kelola pajak serta retribusi daerah (Miftachul Huda et al., 2025). Sistem pemungutan yang sederhana, transparan, dan berbasis teknologi akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Digitalisasi dalam proses pembayaran pajak dan retribusi, seperti penggunaan aplikasi daring atau

sistem e-payment, dapat mengurangi praktik kebocoran pendapatan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Mangoting et al., 2024).

Selain perbaikan sistem administrasi, evaluasi terhadap kebijakan tarif pajak dan retribusi juga perlu dilakukan secara berkala. Penyesuaian tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Misalnya, dalam konteks retribusi sampah, pemerintah daerah harus memastikan bahwa tarif yang ditetapkan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Jika tarif terlalu tinggi tanpa peningkatan kualitas layanan, masyarakat cenderung enggan membayar retribusi, yang pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian tarif harus berbasis data yang akurat serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Kinanti et al., 2025).

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD, pemerintah daerah juga perlu menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam bentuk kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*). Kemitraan ini dapat dilakukan dalam berbagai sektor, seperti pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pengembangan infrastruktur daerah, serta pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik serta membuka peluang investasi yang dapat memperkuat struktur ekonomi daerah. Selain kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD. Aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas dalam bidang keuangan daerah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan fiskal, regulasi perpajakan, serta strategi pengelolaan pendapatan daerah. Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala dapat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan akuntabel (Syahrul Hidayatullah dkk, 2023).

Upaya optimalisasi PAD juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan secara efektif untuk membiayai

program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar. Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Hidayat, 2022).

2. *Produk Domestik Regional Bruto*

Produk Domestik Regional Bruto Pendapatan Regional merupakan ukuran ekonomi yang menilai kinerja ekonomi suatu wilayah (Romhadhoni et al., 2018). Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mendapatkan ukuran pendapatan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah pada periode waktu tertentu (Abdulfatah Totoh & Mulyani, 2024). PDB juga dapat menunjukkan bagaimana barang dan jasa digunakan, baik untuk konsumsi, ekspor, maupun disimpan dalam inventori untuk dijual pada periode mendatang.

Penyajian PDRB terbagi menjadi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Melalui PDRB dapat digambarkan struktur, tingkat, dan laju pertumbuhan perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Selain itu, PDRB juga merupakan indikator ekonomi yang digunakan secara luas sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. PDRB pun menjadi alat untuk membantu berbagai pihak dalam memahami dan mengelola perekonomian. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Alasan-asal inilah yang menjadi PDRB sebagai indikator utama dalam mengukur perekonomian

suatu wilayah. Jenis Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Secara konsep, Produk Domestik Regional (PDRB) dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan (Mudji & Taripar, 2018):

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu negara pada periode waktu tertentu (biasanya dalam tahun) ditambah pajak atas produk neto (pajak kurang subsidi atas produk).

b. Pendekatan Pendapatan. PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara pada periode waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun).

c. Pendekatan Pengeluaran. PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran Rumah Tangga, (2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT, (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (5) Perubahan Inventori, (6) Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor). Perhitungan PDRB dari sisi yang berbeda ini mencakup perbedaan metode, ruang lingkup, hingga sumber data yang digunakan. Perbedaan ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam membuat estimasi, mengontrol kelayakan estimasi, dan dapat memberikan manfaat lebih dalam melakukan analisis PDRB.

Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah (Tanjung et al., 2024) : a. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun. b. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori lapangan usaha ekonomi dengan peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. c. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Indikator ini dapat mencerminkan secara kasar pendapatan setiap

penduduk suatu wilayah. d. PDRB perkapita atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu provinsi (Wijayanti & Laksono, 2024).

3. *Belanja Daerah*

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Pangestu, 2023). Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja (Basir et al., 2021).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi Belanja menurut Urusan Wajib mencakup urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Arsip, dan Komunikasi dan Informatika. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup urusan: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dan Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja mencakup:

1. *Belanja Tidak Langsung, meliputi:*

- a. Belanja Pegawai. Digunakan untuk belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
- b. Bunga. Digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok

utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- c. Subsidi. Digunakan untuk subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Hibah. Pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah,.
- e. Bantuan Sosial. Pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk PARPOL.
- f. Belanja Bagi Hasil. Dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagikan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagikan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja Tak Terduga. Untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. *Belanja Langsung, meliputi:*

- a. Belanja Pegawai. Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan

pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

- b. Belanja Barang dan Jasa. Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- c. Belanja Modal. Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

3. METODE

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independen, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah, terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Realisasi APBD Kota Jambi, dan Dokumen Keuangan Daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk periode waktu *Time Series* dari tahun 2015 sampai 2024. Selanjutnya analisis data pertama menggunakan statistik deskriptif melalui penyajian data melalui tabel, grafik, serta perhitungan persentase perkembangan (Alfaturisya, 2023). Selanjutnya analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*), sebagai salah satu bentuk analisis regresi linier di mana variabel bebasnya lebih dari satu, serta dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya (Rahmadhani et al., 2023).

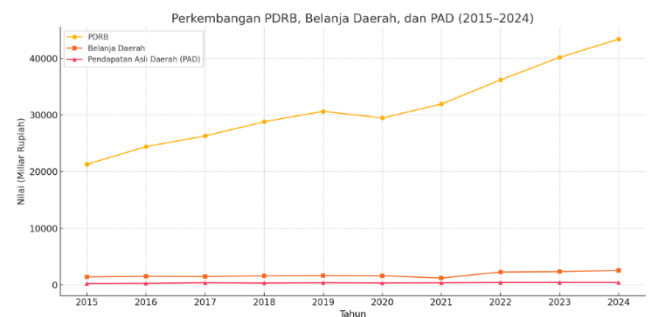
Analisis data penelitian mempergunakan bantuan aplikasi SPSS, serta persamaan regresi $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$, dimana Y (PAD), α (*Konstanta*), β_1 , β_2 , (*Koefisien Regresi*), X_1 ($PDRB$), X_2 (*Belanja Daerah*) dan ε (*Error Term*). Sedangkan pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis *error correction model*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen dengan uji F, uji t, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Serta uji R^2 (*R-Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Dimas et al., 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jambi periode tahun 2015 sampai 2024 seperti pada Grafik 4. berikut ini:



Grafik 4. Kondisi PDRB, Belanja Daerah, serta PAD Kota Jambi 2015 - 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengukur total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu. Data dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari Rp21.293,45 miliar pada 2015 menjadi Rp43.375,48 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup konsisten, meskipun pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi mulai terlihat kembali pada 2021 dan meningkat tajam hingga 2024. Peningkatan PDRB ini bisa dikaitkan dengan berkembangnya sektor-sektor produktif di daerah, seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa.

Belanja Daerah mencerminkan seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan operasional pemerintahan.

Nilai belanja daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif, dari Rp1.425,60 miliar pada 2015, turun di tahun 2021 menjadi Rp1.224,42 miliar, kemudian meningkat tajam hingga mencapai Rp.2.556,01 miliar pada 2024. Kenaikan signifikan pasca 2021 dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui belanja modal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik. Fluktuasi belanja juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dari sumber-sumber lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dari tahun 2015 ke 2024, PAD mengalami pertumbuhan dari Rp.263,92 miliar menjadi Rp.454,89 miliar. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan PDRB dan Belanja Daerah, tren ini menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Peningkatan PAD juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun daerah secara berkelanjutan.

2. Hasil Analisis Regresi

Hasil regresi berikut ini menjelaskan hubungan antara PDRB (X_1), Belanja Daerah (X_2) terhadap PAD (Y).

Tabel 1: Model summary hubungan PDRB dan Belanja Daerah terhadap PAD

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.811	.758	32.07566

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PDRB

Nilai R (*Korelasi*) = 0,901, Angka ini menunjukkan tingkat hubungan antara variabel independen (PDRB dan Belanja Daerah) terhadap variabel dependen (PAD). Nilai 0,901 berarti hubungan ini sangat kuat dan positif. Sedangkan *R Square* (R^2) = 0,811, berarti ada 81,1% variasi yang terjadi pada PAD dapat dijelaskan oleh PDRB dan Belanja Daerah secara simultan dan sisanya, 18,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Tabel 2: Coefficients Pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap PAD

Variabel Bebas	Koefisien (β)	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	113.154	49.362	7.200	0.056
PDRB	0.010	0.003	-3.570	0.014
Belanja Daerah	-0.023	0.046	-.501	0.632

$$PAD = 113,154 + 0,010 \times PDRB - 0,023 \times Belanja\ Daerah$$

Nilai Konstanta (*Intercept*) sebesar 113,154 dengan interpretasi jika variabel independen PDRB dan Belanja Daerah bernilai Konstan atau tetap, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar 113,154 satuan. Nilai sig. = 0,014 < 0,05, pengaruh PDRB terhadap PAD menjelaskan dimana PDRB berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD sedangkan koefisien positif (0,010) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan PAD. Selanjutnya Nilai sig. = 0,632 > 0,05, pada pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh signifikan Belanja Daerah terhadap PAD sedangkan koefisien negatif (-0,023) justru menunjukkan bahwa peningkatan Belanja Daerah cenderung diikuti penurunan PAD, namun tidak signifikan secara statistik.

Tabel 3: Model Anova Pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap PAD

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	31003.15	2	15501.57	15.067	.003 ^b
Residual	7201.93	7	1028.84		
Total	38205.08	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PDRB

Hasil Uji F (*Signifikansi Model Regresi*) didapatkan Nilai F = 15,067 dan Signifikansi (*Sig.*) = 0,003 < 0,05 Ini menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan, atau dengan kata lain, variabel PDRB dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,901, yang mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel independen yaitu PDRB dan Belanja Daerah terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai ini mendekati angka 1, yang berarti semakin tinggi PDRB dan belanja daerah, maka cenderung semakin tinggi pula PAD yang

diperoleh oleh daerah. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan fiskal memiliki keterkaitan erat dalam mempengaruhi kinerja pendapatan daerah secara umum.

Lebih lanjut, nilai R Square (R^2) sebesar 0,811 menunjukkan bahwa sekitar 81,1% variasi atau perubahan dalam PAD dapat dijelaskan oleh variabel PDRB dan Belanja Daerah secara bersama-sama. Ini berarti model regresi yang digunakan cukup kuat dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Sementara itu, sisanya sebesar 18,9% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti faktor kelembagaan, efektivitas pajak daerah, jumlah penduduk, investasi swasta, serta efisiensi pelayanan publik.

Tingginya nilai R Square ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD melalui strategi peningkatan kinerja PDRB dan pengelolaan belanja daerah yang lebih produktif. Namun, penting pula untuk meninjau kualitas belanja daerah agar lebih fokus pada program yang berorientasi pada pendapatan, seperti investasi pada sektor-sektor strategis atau pelayanan publik yang berdampak langsung pada penerimaan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Zakia Aida Putri, 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi lokal dan alokasi belanja publik yang tepat sasaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa nilai konstanta (intercept) sebesar 113,154. Nilai ini mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah dianggap tetap atau konstan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar 113,154 satuan. Secara statistik, konstanta ini menjadi baseline untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap PAD.

Pengaruh PDRB terhadap PAD menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014, lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini berarti PDRB berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,010 memperkuat temuan ini, menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada PDRB akan meningkatkan PAD sebesar 0,010 satuan. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berperan penting dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berdampak positif terhadap penerimaan PAD karena mendorong aktivitas ekonomi lokal yang tercermin dalam pajak dan retribusi daerah (Sinaga et al., 2024).

Sementara itu, variabel Belanja Daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,632, jauh di atas ambang batas 0,05. Artinya, secara statistik Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Koefisien regresi bernilai negative (-0,023) bahkan mengindikasikan kecenderungan bahwa peningkatan belanja tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan PAD, dan malah dapat disertai penurunan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi alokasi belanja daerah perlu ditinjau ulang agar dapat memberikan dampak fiskal yang optimal (Ayu & Rahayu, 2019).

Hasil uji F dalam analisis regresi berganda digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan memiliki kemampuan yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F yang diperoleh, nilai F sebesar 15,067 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,003 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun antara PDRB dan Belanja Daerah terhadap PAD adalah signifikan secara statistik karena nilai signifikansi berada di bawah ambang batas 0,05. Artinya, secara simultan kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Signifikansi model ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan kebijakan fiskal dalam bentuk Belanja Daerah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat PAD. Secara teoritis, PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu wilayah, sehingga peningkatan PDRB berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, belanja daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menyediakan layanan publik dan investasi infrastruktur yang juga dapat berdampak pada penerimaan daerah. Ketika kedua variabel ini bekerja secara sinergis, maka kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri akan

semakin kuat, mencerminkan efektivitas desentralisasi fiskal (Dian Syari & Bernadette Robiani, 2017). Temuan ini sejalan dengan berbagai studi empiris yang menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah dan kinerja ekonomi lokal memiliki kontribusi terhadap peningkatan PAD, meskipun efektivitasnya bergantung pada kualitas tata kelola dan efisiensi anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat (Dina Rizky Rahmadani & Widya Nur Padhila, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan PDRB dan optimalisasi belanja daerah agar berdampak langsung terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan transfer pusat, tetapi juga mengoptimalkan potensi penerimaan sendiri sebagai bentuk kemandirian fiskal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi PAD menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi makro daerah dan tata kelola fiskal dalam kerangka analisis yang komprehensif. Pendekatan ini membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana interaksi antara pertumbuhan ekonomi lokal dan kebijakan anggaran daerah membentuk struktur penerimaan asli daerah. Hasilnya dapat menjadi pijakan bagi pengembangan model keuangan daerah yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pelayanan publik.

Dari sisi praktis, studi ini memberikan implikasi strategis bagi pengambil kebijakan daerah. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan fiskal yang lebih terarah, memprioritaskan belanja yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan perluasan basis pajak daerah. Selain itu, pentingnya sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas birokrasi fiskal, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah penting

dalam memperkuat sistem pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, temuan dan analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfatah Totoh, & Mulyani, S. (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 694–701. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Alfaturisya, M. A. (2023). Statistik Deskriptif. <https://www.researchgate.net/publication/367284035>
- Ayu, A. L., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja sebagai Variabel Intervening.
- Azwina Putri. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bogor.
- Basir, M., Rahman, S., & Husen, L. O. (2021). Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(8).
- Dian Syari, D., & Bernadette Robiani, S. A. (2017). The Effect Of Fiscal Decentralization To Gross Domestic Regional Product Of District / City In South Sumatra Province. In *SIJDEB* (Vol. 1, Issue 2). <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/sijdeb>
- Dimas, A., Soedyfa, F., & Rochmawati, L. (2020). Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Diterminasi (R²). In *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya Edisi XXX* (Vol. 5, Issue 4).
- Dina Rizky Rahmadani, & Widya Nur Padhila. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen*

- Perbendaharaan, 5(1), 20–37.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Zakia Aida Putri. (2019). Evaluasi Kinerja Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Belanja Publik.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tahun, 5(2), 55.
- Kinanti, K. A., Chandra, Y. A., & Suyono, A. P. (2025). Digital Integration In Tax Systems: Literature Review On Enhancing Efficiency And Ensuring Compliance. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 9(1), 30–54.
<https://doi.org/10.30741/assets.v9i1.1508>
- Mangoting, Y., Widuri, R., Dogi, D. C. P., & Gabronino, R. (2024). Exploring the Potential of Blockchain Technology in Digital Tax Administration to Enhance Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(2), 77–90.
<https://doi.org/10.9744/jak.26.2.77-90>
- Miftachul Huda, M., Aulia Putri, A., Fatkhur Rohman Nuri, M., & Khoirawati, N. (2025). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia. 2(2).
<https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1186>
- Mudji, A., & Taripar. (2018). Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang. In *JURNAL PANGRIPTA* (Vol. 1, Issue 1).
- Nurkodri, M. S., Amir, A., & Zamzami, Z. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 12(1), 29–38.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Rachmi Dewi, S. (2024). The Role of Regional Taxes in Improving the Quality of Public Infrastructure in DKI Jakarta.
- Rahmadhani, A., Sihabudin Sahid, D. S., & Lulu Widyasari, Y. D. (2023). Implementasi SEM-Multiple Linear Regression dalam Prediksi Jumlah Pendaftaran Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi XYZ. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 9(2), 150–162.
<https://doi.org/10.25077/teknosi.v9i2.2023.150-162>
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. 14(2), 115–121.
<https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.2018.115-121>
- Sinaga, N., Nelvia, R., Wineh, S., Suliska, G., Ade, R., & Anjaya, T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v5i6>
- Sofi Irfan. (2023). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. *Jurnal De□is Edisi*, 12, 2023.
- Syahrul Hidayatullah dkk. (2023). Pengaruh Transparency, Accountability, partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Syaifullah. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Sumatera Utara.
- Tanjung, A. H., Andaru, A. A., Sari, L. D., Muhammad Satrio A, Olivia Hilda I, & Antriandarti, E. (2024). Analisis PDRB provinsi terhadap pengaruh berbagai faktor dalam keberlanjutan sosial-ekonomi Jawa Tengah. *Journal of Entrepreneurial Economic*, 1(2), 1–11.
<https://doi.org/10.61511/jane.v1i2.2024.1004>
- UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (2022).
- UU Nomor 28 Tahun 2009.
- Wijayanti, D., & Laksono, E. N. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kota Provinsi Lampung tahun 2017 – 2021. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 10–15.
<https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss1.art2>